

PERS DAN POLITIK
Studi Terhadap Peran Harian Kabar Priangan Kota Tasikmalaya Dalam
Komunikasi Politik

Hendra Gunawan¹

Fitriyani Yuliatwati²

ABSTRACT

The role of the press in Indonesia experienced a shift in accordance with the historical development of the state and its political system, but the Indonesian press still has a character constant, namely socio-political commitment is strong. After experiencing difficult times in the New Order Release experienced a resurgence in the Reformation with the enactment of Law no. 40 of 1999 on the Press. The policy also has become a milestone in the birth of mass media at the local level such as the Daily Kabar Priangan in the City of Tasikmalaya, so authors are interested to take the title of Press and Politics: Studies Role Against City Daily Priangan Tasikmalaya In Political Communication

The method used in this research is descriptive method kualitatif phenomenology. Reasons used by the author using this research method because this method requires researchers to the subject of unification between supporters of the research. Qualitative research methodology based on phenomenology requires a holistic approach, mendudukan double object of research in construction, see the object in a natural context rather than partial. Thus, in this study researchers conducted in-depth interviews with informants.

At the local level, especially the City Tasikmalaya role of the press, especially in political communication is very important because the press can bridge the political communication between the Government and Society. Additionally press also must be able to function as social functions, entertainment, economic, supervision and monitoring and social control so that the press can be a pillar of democracy at the local level.

Keyword : *Pers, Political Communication, Mass communication*

ABSTRAK

Peranan pers di Indonesia mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan sejarah negara dan sistem politiknya, namun pers Indonesia tetap memiliki karakter yang konstan, yakni komitmen sosial-politik yang kuat. Setelah mengalami masa-masa sulitnya pada masa

¹⁻². Staf Pengajar Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Orde Baru Pers mengalami kebangkitan pada masa Reformasi dengan diberlakukannya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebijakan tersebut pun telah menjadi tonggak lahirnya media massa pada tingkat lokal seperti Harian Kabar Priangan di Kota Tasikmalaya sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul **Pers dan Politik: Studi Terhadap Peran Harian Kabar Priangan Kota Tasikmalaya Dalam Komunikasi Politik**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif fenomenologi. Alasan yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian ini karena metode ini menuntut bersatunya antara peneliti dengan subjek pendukung penelitian. Metodologi penelitian kualitatif dengan berlandaskan fenomenologi menuntut pendekatan holistik, mendudukan objek penelitian dalam konstruksi ganda, melihat objeknya dalam konteks natural bukan parsial. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan.

Pada tingkat lokal terutama Kota Tasikmalaya peran pers terutama dalam komunikasi politik sangat penting karena pers dapat menjembatani komunikasi politik antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu Pers juga harus mampu menjalankan fungsinya sebagai fungsi sosial, hiburan, ekonomi, pengawasan dan pemantauan dan kontrol sosial sehingga pers dapat menjadi pilar demokrasi pada tingkat lokal.

Kata Kunci: Pers, Komunikasi Politik, Komunikasi Massa

PENDAHULUAN

Kajian mengenai media di negara berkembang cenderung lebih menekankan dominasi atau hegemoni kekuasaan negara, dimana media digunakan sebagai alat propaganda negara atau menjadi alat kepentingan untuk melestarikan ideologi penguasa (hegemoni). Dalam hal ini ada kepentingan yang cukup signifikan dari pemegang kekuasaan untuk menggunakan media sebagai alat politik dalam mencapai tujuannya. Misalnya saja, dalam sebuah kasus di Thailand, fokusnya selalu mengenai penggunaan media elektronik oleh pihak militer dan aktor negara lainnya. Media dipandang sebagai “pion” dari kekuasaan negara, atau sebut saja sebagai aktor yang melayani negara (*servant of the state*).

Kaitannya yang erat dengan kontrol dan sensor negara, dan pemahaman tentang bagaimana aspek media berfungsi dalam titik waktu tertentu, juga kecenderungannya untuk terlalu berpusat pada negara (*state-centric*). Media pada dasarnya memiliki karakter yang bermacam-macam dan jamak, terlihat dari kenyataan bahwa media cetak sering meliput tentang isu-isu politik. Seiring dengan kekuasaan negara yang semakin melemah di seluruh dunia, sensor dari negara menjadi semakin melemah pula. Upaya untuk mempengaruhi muatan

dan nada dari publikasi pemberitaan menjadi tidak selalu berkaitan dengan negara, namun oleh politisi oposisi, petinggi militer, pihak publik, pelobi, perusahaan, dan kelompok non-pemerintah, dan pihak lain, semuanya terlibat disini.

Hal menarik untuk menjelaskan tentang konsep peran politik dari media adalah bab yang ditulis oleh pengamat Jepang, Susan Pharr, yang mengemukakan adanya 4 (empat) pandangan yang saling berlawanan, yaitu: *pertama* media sebagai penonton (*spectator*); *kedua*, sebagai penjaga (*watchdog*); *ketiga*, sebagai pelayan (*servant*); dan *keempat*, sebagai penipu (*trickster*). Pharr memandang media sebagai penipu, sebuah kosa kata yang dibuatnya sendiri. Menurutnya, penipu merupakan partisipan aktif dalam proses politik. Dampak utama dari peran penipu sebagai pembangun komunitas. Label penipu kemudian berubah menjadi kosa kata yang positif, yaitu mencerminkan perilaku media yang penuh dengan kebaikan (Pharr, 1996:24-36).

Perilaku media secara frekuentatif menampilkan sisi yang ambigu, hipokrit, dan inkonsisten, singkatnya mereka itu bersifat licin dan dan menipu. Menipu dalam konteks ini, meski dapat dipandang sebagai positif, tetapi juga mengandung sisi yang bersifat membahayakan dan destruktif. Pharr berpendapat bahwa media penipu tidak mewakili kepentingan satu kelompok tertentu pun, seperti media di Asia Tenggara yang secara frekuentatif terjebak dalam berbagai kepentingan. Tipuan ini tidak datang dari kurangnya loyalitas, namun dari loyalitas yang berlipat, pluralitas dalam kewajiban, dan beragamnya *stakeholder* mereka. Sangat jelas bahwa *stakeholder* mereka yang bermacam-macam menghasilkan kekuatan sekaligus kelemahan. Analisis media dari barat cenderung melihat hubungan partisan dalam konteks hubungan formal dan informal antara organisasi media dan partai politik.

Dalam konteks Asia Tenggara, definisi ini belumlah memadai; hubungan partisan harus dipahami sebagai rangkaian keseluruhan dari hubungan antar-praktisi, secara paralel dengan dunia media dan politik. Banyak literatur media di negara berkembang menekankan dominasi atau hegemoni kekuasaan negara, dimana media digunakan sebagai alat propaganda negara (Pharr, 1996:24 -36).

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut peran pers dalam perpolitikan Kota Tasikmalaya khususnya. Dengan mengambil Media Harian Kabar Priangan ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang jelas antara

teori komunikasi politik dengan peran pers yang dikembangkan di Kota Tasikmalaya ini.

RUMUSAN MASALAH

Dalam suatu penelitian ilmiah, masalah yang akan dibahas mungkin akan terlalu luas. Hal itu dikarenakan satu fenomena sosial tidak hanya terjadi oleh satu faktor, akan tetapi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Masalah yang kompleks dan rumit itu perlu untuk disederhanakan supaya dapat dengan mudah dipahami. Untuk itu penulis merumuskan masalah ini dengan rumusan sebagai berikut Bagaimana peran Media Harian Kabar Priangan Tasikmalaya dalam perpolitikan Kota Tasikmalaya?

KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori untuk menganalisis berbagai fenomena sosial yang terkait dengan pers dan Politik ini. Teori-teori yang akan penulis gunakan antara lain:

Komunikasi Massa

Secara sederhana, Onong Uchjana Efendi menyebutkan komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu. Sementara itu, sebagai salah satu cabang ilmu sosial, Ilmu Komunikasi juga terbagi ke dalam beberapa kajian ilmu lagi. Pembagian ini mengingat keterbatasan manusia untuk menguasai seluruh bidang ilmu. Komunikasi juga mengklasifikasikan diri kedalam Komunikasi Massa, Komunikasi Politik, Komunikasi Antar Budaya dan lain sebagainya.

Komunikasi Politik

komunikasi politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara "yang memerintah" dan "yang diperintah".

Media Masa

Media massa atau Pers adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus

didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan dan kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi karena pilihan mereka yang terbatas. Masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi memiliki lebih banyak pilihan dan akses banyak media massa, termasuk bertanya langsung pada sumber atau ahli dibandingkan mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa tertentu.

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV (Cangara, 2002). Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses imitasi (belajar sosial). Dua fungsi dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi (Rakhmat, 2001).

METODE PENELITIAN DAN ANALISIS

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif fenomenologi. Alasan yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian ini karena metode ini menuntut bersatunya antara peneliti dengan subjek pendukung penelitian³. Metodologi penelitian kualitatif dengan berlandaskan fenomenologi menuntut pendekatan holistik, mendudukan objek penelitian dalam konstruksi ganda, melihat objeknya dalam konteks natural bukan parsial⁴

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan sistem *purposive sampling*. Artinya sampel yang diambil adalah dari partisipan yang unik atau menarik untuk diteliti⁵. Selain itu untuk ketajaman dalam dalam penelitian ini, penulis juga akan menggunakan teknik penetapan sampel dengan sistem *snowball sampling*. Artinya teknik pengambilan sampel dengan mengajukan pertanyaan kepada subkelompok untuk mengidentifikasi orang lain yang mungkin bisa kita teliti pula⁶.

³ Noeng Muhajir, "metodologi penelitian kualitatif" hal 19

⁴ ibid hal 18

⁵ Lisa Harrison, "Metodologi Penelitian Politik" hal 26.

⁶ Ibid hal 25

Data merupakan fakta empirik, baik kualitatif (bentuknya klasifikasi) maupun kuantitatif (bentuknya numerik), hasil pengamatan dan pengukuran⁷. Karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitain kualitatif, maka datanya dapat dikelompokan dalam 2 bentuk: (a) Data Internal. Yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga mengenai kegiatan internal dan hasilnya digunakan oleh yang bersangkutan. (b) Data Eksternal. Yaitu data yang dihasilkan oleh sumber dari luar. Data eksternal ini kemudian dibagi kedalam data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpunsecara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga besangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok dan hasil observasi terhadap karakteristik benda, kejadian, kegiatan dan hasil pengujian tertentu. Data Sekunder. Data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya untuk suatu penelitian tertentu⁸. Bentuk ini antara lain buku-buku, dokumen, leteratur, media masa dan sumber-sumber media cetak lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Segera setelah Soeharto jatuh dan kemudian digantikan oleh Habibie terjadi reformasi dalam dunia penerbitan media. Kemudahan dalam proses penerbitan membuat terjadinya *booming* media. Sepertinya siapa saja asal punya modal bisa melakukan penerbitan media, pokoknya terbit dulu masalah lain menyusul belakangan. Meski akhirnya banyak yang tumbang tetapi jumlah media bisa dikatakan luar biasa banyaknya jika dibanding dengan masa sebelumnya. Demikian juga dengan kebutuhan jurnalis untuk mengisi posisi dalam penerbitan media juga meningkat secara luar biasa tak sesuai potensi yang tersedia. Persaingan yang ketat dan sumberdaya manusia yang terbatas menuntut media untuk mengembangkan kiat-kiat tertentu untuk menggaet pembaca, pemodal dan pengiklan.

Sikap kritis masyarakat terhadap media memang masih tersembunyi dibawah permukaan, namun tuntutan untuk sebuah praktek jurnalisme yang baik bukanlah suara yang tak terdengar. Suara ini merupakan tantangan bagi media untuk membuktikan fungsi yang sesungguhnya di masyarakat. Pemilihan Kepala

⁷ Hand out mata kuliah "Statistik Sosial" oleh Harun Ar Rasyid

⁸ Rosadi Ruslan, "*Metode Peneiltian. Public Relatios dan Komunikasi*". Hal 137

Daerah adalah area yang paling dekat bagi media untuk mengambil peran yang konstruktif bagi pembangunan demokrasi lokal mengingat media juga dipandang sebagai salah satu pilar demokrasi. Media bisa menjawab kebutuhan masyarakat terutama dalam area pendidikan politik warga, sebuah tugas dan tanggungjawab yang diabaikan oleh institusi politik di negeri kita ini. Memang biasanya peran ini diambil oleh *ornop*, namun tanpa bantuan media daya jangkauannya (*coverage area*) amat terbatas. Belum lagi dukungan lembaga pendanaan (*funding agency/donor*) untuk isu ini rasanya kecil sekali atau bahkan hampir tidak ada lagi yang tentu akan membuat *ornop* “kurang tenaga”. Dengan demikian media adalah yang menjadi harapan masyarakat untuk menjawab kebutuhan akan informasi seputar seluk-beluk Pilkada secara berimbang.

Dalam kerangka pemberdayaan politik masyarakat maka media harus bisa menempatkan diri sebagai alat referensi sekaligus transformasi masyarakat dalam menghadapi Pilkada. Media dan jurnalis yang mempunyai kebebasan untuk berekspresi harus berpikir ulang untuk memastikan bahwa sajian pemberitaannya bebas bias kepentingan dari kelompok politik, dunia usaha dan kelompok kepentingan lainnya. Termasuk didalamnya membebaskan diri dari adanya *double standard* dalam menilai berbagai kelompok yang berkepentingan dengan media. Menghadapi Pilkada dengan segala kompleksitas dan kemungkinan konflik-konflik yang terkandung didalamnya, bentuk-bentuk jurnalisme konvensional yang mengandalkan *mantra* 5 W + 1 H tidak lagi memadai. Iklim politik menjelang Pilkada yang diwarnai dengan persaingan antar calon, mobilisasi dukungan, *manuver-manuver* untuk menarik simpati pendukung termasuk melemahkan dukungan terhadap calon lainnya.

Suasana ini ibarat hadirnya “medan perang” kepentingan di wilayah yang hendak melaksanakan Pilkada. Dalam kondisi ini media dan jurnalis bekerja dalam situasi yang penuh resiko, bukan saja untuk dirinya sendiri tetapi juga terutama untuk masyarakat luas, sehubungan dengan apa yang ditulis dan kemudian dipublikasikan melalui medianya.

Dengan mempertimbangkan dampak atas publikasinya maka berbagai pertimbangan perlu diambil. Dalam pilkada yang berkompetisi bukan sekedar para calon dan pendukungnya semata melainkan juga identitas dan konstruksi sosial yang menyelimuti keduanya. Kompetisi dengan tujuan menang kalah ini dengan mudah akan memancing upaya untuk menempatkan yang lain (*the other*)

sebagai lebih rendah, kurang bermutu dan kurang layak lewat berbagai macam *stereotype* dan penilaian/penghakiman (*black campaign*). Dengan demikian pemilihan kata (diksi) baik untuk judul maupun isi perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh terutama agar tidak menonjolkan pernyataan yang panas, kasar, kejam dan mengancam pihak lainnya.

Demikian juga dengan pemilihan nara sumber berita harus memperhatikan *diversivitas* narasumber atau diambil dari banyak pihak (*multi sources*), berimbang atau *cover both side* (bahkan *multi sides*) mutlak ditegakkan sebagai acuan. Unsur mengapa dan bagaimana dari *mantra* 5 W + 1 H harus lebih dieksplorasi bahkan diharapkan juga mampu menambahkan unsur S (*solutions*) dan C (*common ground*). Ini semua memang tidak sekedar membutuhkan stamina tetapi juga *compassion*; artinya jurnalis mempunyai pemahaman bahwa jurnalis juga warga yang menginjak tanah, meminum air dan menghirup udara yang sama dengan warga lainnya yang punya harapan sama agar pelaksanaan Pilkada bukan sekedar menjadi kemenangan calon yang terpilih saja melainkan juga kemenangan seluruh masyarakat dalam upaya mengatasi segenap permasalahan kehidupan bersama.

Bertolak dari kenyataan eksistensi media massa pada era pasca pemerintahan Soeharto yang ditengarai oleh kuatnya dominasi penguasa pada semua infrastruktur politik, dengan tujuan menghegomi atau untuk pembelajaran politik untuk mengapolitisasi warga negara. Media menjadi perpanjangan tangan kepentingan penguasa, bahasa politik bermakna ganda untuk tujuan penghalusan maupun untuk kepentingan memperdayakan warga negara, keduanya adalah bagian dari politik hegemoni sebagai syarat untuk mengukuhkan kuasa penguasa. Kuasa bahasa melalui penggunaan media menjadi pilihan politiknya. Bahasa yang bermakna ganda yang hampir menguasai isi media massa menjadi alat meminggirkan dan mengapolitisasi warga untuk menjauh dari arena politik formal.

Dengan tujuan melestarikan kekuasaan dari elite politik (pemegang kuasa). Perlawanan-perlawanan politik warga untuk menyuarakan aspirasi politiknya tetap tak merubah kondisi sistem politik represif saat itu. Fenomena dalam era transisi saat ini, media memiliki ruang yang lebih besar. Tetapi dibalik itu semua, ada keunikannya. Karena sistem politik Indonesia berada dalam pusaran globalisasi, eksistensi media tak luput dari apa yang ada dalam

pendirian kaum hegemonian, menempatkan kebudayaan global yang bersifat tunggal sebagai watak kapitalisme yang monolitik (struktur modal kapitalistik), sehingga seluruh ekspresi kebudayaan termasuk ekspresi simboliknya mengacu pada ekspresi dominan atas nama pasar, dan media tidak berfungsi sebagai representasi maupun rekonstruksi realitas sosial politik, melainkan lebih dari itu.

Asumsi yang mendasari adalah, *pertama* media adalah sebuah institusi dan aktor politik yang memiliki hak-hak. *Kedua*, media dapat memainkan berbagai peran politik, diantaranya mendukung proses transisi demokrasi, dan melakukan oposisi. Sebagaimana disinyalir oleh Cook, bahwa hal ini telah menjadi perhatian penting pada masyarakat Barat, dimana para jurnalis telah berhasil mendorong masyarakat untuk tidak melihat mereka sebagai aktor politik, sedangkan para pakar politik juga telah gagal untuk mengenali media sebagai sebuah institusi politik (Cook, 1998:4). Jika mempercayai media sebagai aktor politik, maka peran macam apa yang dimainkannya?

Dalam negara berkembang seperti Indonesia, pemusatan peranan politik media telah diakui. negara telah sering menekankan pentingnya pers dalam proses *nation building*. Sebagaimana pernah diucapkan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya pada hari Pers Nasional tahun 1989:

“Sebagai bagian integral dalam masyarakat, bangsa dan negara yang sedang berkembang, maka pers memiliki peranan penting dalam membantu mengelola bangsa ini dengan semua kerumitannya melalui diseminasi berita, opini, ide, harapan ke masyarakat.... Media dalam konteks ini telah memainkan peran membantu membangun dan melestarikan kesatuan dan persatuan sebagai sebuah bangsa” (McCargo, 1999:131).

PERAN POLITIK HARIAN KABAR PRIANGAN DI KOTA TASIKMALAYA

Media lokal merujuk pengertian media yang dikelola, terbit, atau beroperasi di daerah. Artinya kantor pusat berlokasi di daerah tertentu dan mayoritas berita yang dimuat adalah berita mengenai daerah tersebut karena aspek kedekatan (*proximity*). Dalam konteks surat kabar, dapat dilihat dari sisi distribusi, surat kabar daerah biasanya tidak dapat dibeli di daerah-daerah lain, kecuali secara berlangganan. Konsepsi ini sedikit berbeda dengan surat kabar regional dengan skala distribusi nasional sebagaimana fenomena koran *Jawa Pos*. Media regional semacam ini terbit di daerah (biasanya di ibukota provinsi) dan disebarakan ke daerah lain, bahkan ke seluruh Indonesia. Sedangkan media

lokal mencerminkan aspek pemberitaan yang lebih sempit dan lebih bersifat kedaerahan.

Gazali (2000: 299) menyebutkan, definisi lokalisme yang paling tradisional bersifat *spatial emphasis* dan berdasarkan pada pemahaman geografis terhadap sebuah komunitas. Prinsip filosofis yang ada dibelakangnya menunjuk pada *market place* yang merupakan pusat kehidupan komunitas sebelum tumbuhnya urbanisasi. Baik sirkulasi komoditi maupun diskursus publik berlangsung di pasar. Lebih lanjut Yusuf (2008: 115) menegaskan, lokalisme ini terutama dialami pers Indonesia sejak era reformasi, sekaligus menandakan pers Indonesia menapaki tahap baru dalam identitas pers di tanah air yang terus-menerus berubah seiring dengan gejolak dinamika politik. Sementara itu, *World Association of Newspaper* (WAN) mengistilahkan pers lokal semacam ini sebagai *community newspapers* atau koran komunitas.

Yunus Yosfiah, Menteri Penerangan Republik Indonesia di era Habibie pernah mengemukakan harapannya bahwa di setiap DATI II, kabupaten, dan kotamadya memiliki penerbitan sendiri (Mahtoem, 2006). Statemennya tentu bukan tanpa alasan mengingat pada saat itu, *euforia* menerbitkan koran melanda hampir di semua wilayah tanah air. Awalnya dari kejenuhan dan persaingan penerbit yang beroperasi di Jakarta dan ibukota provinsi, meluber ke pasaran lain di kota-kota DATI II. Tingginya *Market demand* ini didukung kehausan masyarakat akan informasi aktual perkembangan politik dan ekonomi. Tawaran memberikan berbagai pilihan informasi terbaru inilah yang mendorong kehadiran media-media lokal di daerah bisa diterima masyarakat daerah.

Tren media lokal (provinsi, kabupaten, kota) yang berkembang di dunia sebenarnya sudah lebih dulu mewabah dibanding Indonesia. Cakupan nasional tidak lagi dilirik karena tingginya biaya distribusi dan liputan. Di Amerika Serikat misalnya, koran-koran lokal semacam *Washington Post*, *The New York Times*, *Chicago Tribune*, atau *Los Angeles Times* justru merajai konsumsi media di daerah-masing-masing. Menurut Mahtoem Mastoem yang juga Ketua Harian Pelaksana Harian Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Pusat, di Amerika Serikat sudah sangat sulit menebitkan surat kabar nasional karena tiap kota memiliki segmen, kebutuhan dan kebanggaan sendiri-sendiri. Sejak tahun 1950-an hingga sekarang, sebagian besar koran yang eksis adalah koran lokal atau regional. Amerika Serikat yang sering dijadikan kiblat bagi surat kabar dunia, memiliki lebih

banyak *state newspaper* atau koran negara bagian. Demikian juga di negara-negara Eropa, koran lokal lebih eksis dan berkembang (Mastoem, 2006: 34).

Di Indonesia, *positioning* sebagai media lokal dan komunitas sebenarnya sudah lama digagas oleh beberapa koran kuat di daerah misalnya *Suara Merdeka*, *Kedaulatan Rakyat*, *Pikiran Rakyat*, dan *Bali Post*. Namun pada dasawarsa 1980-an hingga akhir 1990-an, koran-koran lokal yang disebut diatas tidak terlalu senang disebut koran daerah. Mereka lebih bangga disebut koran nasional yang terbit di daerah. Pengertian koran daerah bisa menurunkan gengsi karena diartikan sangat terbatas, yakni *regional wide*, bukan *national wide*. Meskipun faktor tersebut hanya dalam sirkulasi, bukan pada *content* redaksionalnya (Siregar, 1999).

Kekuatan media massa ini juga digunakan oleh pemerintah maupun suatu kelompok masyarakat tertentu di suatu pemerintahan untuk mempengaruhi opini publik. Dalam dunia politik pun media massa digunakan sebagai alat penyampaian informasi dan pesan yang sangat efektif dan efisien. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Lasswell (1972), bahwa "*the study of politics is the study of influence and the influential*" (ilmu tentang politik adalah ilmu tentang pengaruh dan kekuatan pengaruh). Tampilan media massa akan mengemban beberapa fungsi yang menggambarkan kedemokrasian dalam pemberitaannya. Fungsi-fungsi tersebut merupakan sub-sistem dari sistem politik yang ada.

Seperti yang terjadi pada Harian Kabar Priangan yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Fungsinya sebagai salah satu infrastruktur politik di tingkat lokal berjalan dengan cukup lancar. Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat Tasikmalaya sekarang ini menempatkan Harian Kabar Priangan sebagai salah satu pilar demokrasi yang mendorong terjadinya proses demokrasi di dalamnya. Secara garis besar Harian Kabar Priangan melakukan fungsi-fungsinya sebagai aktor politik di aras lokal.

Fungsi Pertama yang dijalankan oleh Harian Kabar Priangan adalah, fungsi sosial, dimana dalam pemberitaannya Harian Kabar Priangan menyediakan berbagai topik pemberitaan sebagai bahan perbincangan dan diskusi di rumah, tempat kerja, sekolah, ruang kuliah, lokakarya/seminar dan bahkan di tempat nongkrong.

Wawancara yang dilakukan dengan Pimpinan Redaksi Harian Kabar Priangan, Drs. Hazairin Mahesa menyebutkan hal demikian:

“Salah satu fungsi yang dijalankan oleh harian kabar priangan ini adalah fungsi sosial. Karena sasaran pembaca kami merupakan masyarakat secara utuh. Artinya seluruh masyarakatlah yang menjadi sasaran baca koran kami. Untuk itu topik yang diangkatnya bermacam-macam, ada masalah yang berkaitan dengan seminar, kuliah, wacana politik, wacana ekonomi, sosial, dan juga masalah kriminalitas”⁹

Kedua, fungsi hiburan. Kehidupan masyarakat tidak semuanya harus serius, dengan demikian maka Harian Kabar Priangan pun menyajikan berita dan cerita yang lucu dalam berbagai bentuk seperti anekdot, komik, selebritas dan hal-hal ringan lainnya yang menghibur.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Drs. Hazairin menyebutkan:

“Fungsi hiburan adalah fungsi media untuk menghibur manusia. Manusia cenderung untuk melihat dan memahami peristiwa atau pengalaman manusia sebagai sebuah hiburan. Media massa mempunyai fungsi-fungsi ini, yaitu membentuk komunitas dan komunikasi virtual, seperti halnya kelompok internet di dunia maya. Internet dapat dipahami sebagai alat atau media umum yang bisa secara komplet memenuhi fungsi media massa “tua” yang dianggap hiburan paling tren saat ini. Internet bisa menyempurnakan transaksi komersial, menyediakan dukungan sosial dan mengirim jasa pemerintahan.”

Ketiga, fungsi ekonomi. Muatan dalam bentuk *advertising* membantu menstimulasi ekonomi dan masyarakat konsumen akan ketersediaan berbagai macam produk dan layanan jasa. Keempat, fungsi penyimpan rekaman data/fakta yang daripadanya kita bisa menemukan pemberitaan menyangkut jumlah kelahiran, perkawinan, perceraian, korban wabah penyakit-bencana, pemenang pertandingan, orang miskin, tingkat kenaikan harga, dan sebagainya.

Kelima, fungsi pengawasan dan pemantauan (*watch dog*). Harian Kabar Priangan melihat bahwa media/jurnalis dituntut untuk mengkritisi praktek kebijakan baik dari pemerintah maupun institusi lain yang berkaitan erat dengan kepentingan publik. Oleh karena itu slogan yang dikedepankan oleh Harian Kabar Priangan ini adalah kritis tapi etis. Lebih jauh Hazairin menyebutkan:

“sebagai salah satu *social control* atau fungsi pengawasan, kami dituntut untuk selalu kritis dengan apa yang menyangkut masalah publik. baik itu yang dikeluarkan oleh negara dalam hal ini adalah Pemda dan yang dikeluarkan oleh institusi swasta. Tujuan dari dilakukannya fungsi ini

⁹ Wawancara tanggal 19 September 2011 jam 10.00

adalah untuk menjaga hubungan baik antara rakyat dan pemerintahannya”¹⁰

Sebagai pengamat lingkungan dari kondisi sosial politik yang ada. media massa berfungsi sebagai alat kontrol sosial politik yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai penyimpangan sosial itu sendiri, yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah, swasta, maupun oleh pihak masyarakat. Contoh penyimpangan-penyimpangan seperti praktek KKN oleh pemerintah, penjualan pasir ke Singapura yang mengakibatkan tujuh pulau hilang dan tenggelam (suatu kerugian yang lebih besar dari sekadar perebutan pulau Sipadan dan Ligitan), perilaku masyarakat yang tidak tertib hukum/anarkis, polemik Susno-Polri, dan lain-lain. Berbagai permasalahan sosial tersebut akan membuka mata kita bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Dengan melihat pada kelima fungsi yang dijalankan oleh Harian Kabar Priangan, maka jelas bahwa media adalah elemen penting yang sangat menentukan gerak dan dinamika masyarakat terutama di Kota Tasikmalaya, maka wajar jika masyarakat mempunyai harapan terhadap praktek jurnalisme yang baik (terbuka, jujur, adil dan akurat).

Media dapat dipahami sebagai sebuah titik pertemuan dari banyak kekuatan yang berkonflik dalam masyarakat modern, dan karena itu tingkat kerumitan isu dalam media tinggi. Hubungan antara pemerintah dan media dan politik, dan media dengan masalah globalisasi dan lokalitas, keduanya menjadi hal yang kontroversial dalam kajian media umumnya (Koike: 2002:13-14). Penggambaran tentang bagaimana media berandil dalam meruntuhkan sistem politik Orde Baru pada Mei 1998. Koike mengidentifikasi peranan politis media dalam gerakan reformasi menentang pemilik stasiun televisi, dimana anak-anak Soeharto dan kroninya. Teknologi mutakhir semacam internet memainkan peranan sangat besar dalam mendukung reformasi dan gerakan demokrasi.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

¹⁰ *ibid*

- Effendi, Uhjana. 1993. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Cetakan Pertama. Citra Aidya Bakti. Bandung
- Hamzah, wayan Suandra, 1998, *Delik Pers Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Media Sarana Press
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Miles, Mathew dan A. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta
- Muhajir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*. Rake Sarasin. Jogjakarta
- Oetama, Jacob. 1987. *Perspektif Pers di Indonesia, Cetakan Pertama*. LP3ES. Jakarta
- Subakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana. Jakarta
- Ruslan, Rosadi. 2004. *Metode Penelitian. Public Relatios dan Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2060385-pengertian-media-massa/#ixzz1aOxB95cs>
- <http://www.um-pwr.ac.id/web/artikel/222-komunikasi-politik-dalam-pers-indonesia.html>